

URBAN MILLENNIAL: ANALYSIS OF URBAN SOCIO-SPATIAL POLICY FOR 'GEN-Y' IN INDONESIA

URBAN MILLENNIAL: ANALISIS KEBIJAKAN TATA RUANG KOTA UNTUK 'GEN-Y' DI INDONESIA

Agus Mauluddin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Email: agusmauluddin@sociologist.com

ABSTRACT

By 2050 about 70% of the world's population will live in cities. Now it is around 54%. In Indonesia, for example, BPS noted that the proportion of Indonesia's population living in urban areas was 49% in 2010 and in 2018 it was around 55%. Interestingly, in 2020 the percentage of the population living in urban areas will be dominated by the millennial generation (in the age range of 20 - 40 years), who are in fact of the productive age. This trend is inseparable from the urbanization factor (the process of becoming urban). With a literature study: reviews of various international and national journals, as well as literature sources for books and documents, this study argues the need for an urban socio-spatial policy in Indonesia that can adjust urban functions from the response to potential demographic changes that change naturally in society. Urban spatial planning must adjust to the conditions of the urban population, which is dominated by millennial generations. This generation will be an opportunity or vice versa to become a challenge and even a threat to Indonesia's progress in the future.

Keyword: urban millennial, urban spatial planning, urbanization

ABSTRAK

Pada tahun 2050 sekitar 70% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Kini sudah sekitar 54%. Di Indonesia, misalnya, BPS mencatat proporsi penduduk Indonesia tinggal di perkotaan sebesar 49% di tahun 2010 dan di tahun 2018 saja sudah sekitar 55%. Menariknya, di tahun 2020 persentase penduduk yang tinggal di perkotaan akan didominasi oleh generasi millennial (berada pada rentang usia 20 - 40 tahun), notabene berada pada usia produktif. Tren ini tidak terlepas dari faktor urbanisasi (proses menjadi urban). Dengan studi literature: review berbagai jurnal internasional dan nasional, serta sumber literature buku dan dokumen, studi ini berargumen perlunya sebuah kebijakan tata ruang kota di Indonesia yang mampu menyesuaikan fungsi perkotaan dari hasil respons potensi perubahan demografi yang berubah secara alamiah di masyarakat. Tata ruang kota harus menyesuaikan kondisi penduduk perkotaan yang didominasi oleh para generasi millennial. Generasi ini yang akan menjadi peluang atau sebaliknya menjadi tantangan bahkan ancaman bagi kemajuan Indonesia ke depan.

Kata Kunci: Urban Millennial, Tata Ruang Kota, Urbanisasi

PENDAHULUAN

Diperkirakan pada tahun 2050 sekitar 70 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan (FES, 2017, dalam Mauluddin, 2017; Venerandi et. al., 2018). Kini sudah sekitar 54% (Venerandi et. al., 2018). Tren meningkatnya penduduk dunia tidak terlepas dari faktor urbanisasi yang tahun 2018, misalnya, kecenderungannya sudah mulai terlihat. Dulu di tahun 1950 hanya 30% penduduk tinggal di perkotaan, dari total penduduk di dunia (Venerandi et. al., 2018). Di Indonesia saja, misalnya, data BPS (2010) mencatat proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan di tahun 2010 sebesar 49,8 persen, dan tahun ini sudah sekitar 55 persen (Kompas, 2018).

Menariknya, persentase penduduk di perkotaan didominasi oleh generasi muda (generasi millennial). Di tahun 2020 saja generasi millennial berada pada rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun, *notabene* berada pada usia produktif, generasi ini diprediksi berjumlah 83 juta jiwa atau 34 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 271 juta jiwa. Proporsi generasi ini lebih besar dibandingkan generasi lainnya (seperti generasi X dan Z –yang tidak akan dibahas di dalam *paper* ini). Generasi ini yang akan menjadi peluang atau sebaliknya menjadi tantangan bahkan ancaman bagi kemajuan Indonesia ke depan (Ali, 2016).

Dengan demikian, peluang, tantangan bahkan ancaman dari besarnya kuantitas generasi millennial, perlu direspons segera dengan kebijakan tata ruang kota yang menyesuaikan fungsi perkotaan itu sendiri (Shi, 2018). Ruang kota yang baik mampu merespons kebutuhan dari perubahan yang berlangsung secara alamiah di masyarakat (Ondrejicka, 2017). Perubahan yang dimaksud yaitu proses menjadi urban (urbanisasi) para generasi millennial yang perlu ditata.

Penataan urbanisasi harus dipahami secara tepat nilai dan potensi penduduk dan pekerjaan di pusat kota, sebab efek aglomerasi. Promosi kota dengan kepadatan tinggi, namun efisiensi dan pengembangan kualitas tinggi jauh lebih tepat daripada hanya menggunakan “urbanisasi” (yang berlebihan) sebagai alasan untuk mengendalikannya secara sewenang-wenang. Seperti dengan membubarkan secara buta semua sumber daya dan elemen yang dirasa tidak diperlukan di pusat kota menuju pinggiran kota, dan tindakan irasional, misalnya pengusiran migran, dilakukan dengan terburu-buru.

Para pembuat kebijakan perlu memahami generasi millennial. Tren populasi generasi millennial di perkotaan harus dipahami dan memfokuskan diskusi pada pemanfaatan potensi dari perubahan demografi ini. Tujuannya untuk membangun komunitas yang berkelanjutan dan resilien (Lee, 2018).

Dengan demikian, argumen *paper* ini yaitu perlunya sebuah tata ruang kota yang mampu menyesuaikan fungsi perkotaan dari hasil respons potensi perubahan demografi yang berubah secara alamiah di masyarakat. Tata ruang kota harus menyesuaikan dengan kondisi penduduk perkotaan yang didominasi oleh para generasi millennial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan *me-review* berbagai jurnal internasional dan nasional, serta sumber dari buku dan dokumen, seperti UU yang terkait dengan topik penelitian. Penelusuran jurnal difokuskan pada topik penelitian di antaranya terkait dengan tata ruang kota, urbanisasi, dan Gen-Y, serta penelusuran terkait tren kajian perkembangan “tata ruang kota bagi generasi millennial (Gen-Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Menjadi Urban (Urbanisasi)

Berkembangnya generasi millennial di perkotaan tidak terlepas dari faktor urbanisasi. Urbanisasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Firman, dalam Katherina, 2014). Riset yang dilakukan Katherina (2014) misalnya, menjelaskan pola urbanisasi yang terjadi pada wilayah kota lapis kedua berdasarkan data hasil sensus kependudukan tahun 1990, 2000, dan 2010 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk pada kota lapis kedua, namun tidak berjalan secara beriringan dengan rata-rata pertumbuhan wilayah nasional serta dengan wilayah sekitarnya yang berstatus sebagai wilayah penyangga kota utama. Walaupun

demikian, riset lama (*lih* Tjiptoherijanto, 1999) sudah menjelaskan pertumbuhan tetap saja akan terkonsentrasi di pulau jawa.

Pertumbuhan jumlah penduduk pada kota-kota lapis kedua mengalami pertumbuhan yang terus meningkat, namun pertumbuhan tersebut sulit untuk bersaing dengan pertumbuhan kota utama dikarenakan tidak adanya fasilitas yang memadai di kota kedua. Tren urbanisasi yang terjadi pada wilayah kota kedua di Indonesia menunjukkan sebuah pola di mana laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan berkaitan erat dengan ukuran kota (Katherina, 2014).

Selain itu, urbanisasi di Indonesia dipicu oleh pembangunan perekonomian khususnya dalam bidang industri dan jasa yang cenderung ada pada lokasi kota-kota besar. Perkembangan tersebut dikarenakan ketersediaan seperti air, listrik, pelabuhan, dan bandar udara, serta tempat konsentrasi para tenaga kerja terampil dan pasar (Katherina, 2014).

Jakarta sebagai kota utama, misalnya, tentunya menyerap para pekerja tidak hanya di sektor formal, namun sektor informal. Sebab sektor informal di Jakarta menjadi bagian integral dari sektor formal. Fakta diungkap saat krisis 1997-1998 warga Jakarta tetap bisa “bertahan” (Somantri, 2002). Lebih lanjut Somantri (2002) mencontohkan kota utama dengan kota kedua, seperti Jakarta dan Surabaya, Manila dan Cebu, Bangkok dan Chiangmai.

Dari beberapa kota utama akan terbentuk sebuah relasi antara satu kota besar dengan kota besar lainnya. Hal demikian sebuah keniscayaan pola urbanisasi dan perkembangan kota sebagai gejala yang normal dan tidak mungkin untuk dihindari sejalan dengan perkembangan sosio-ekonomi masyarakat (Tjiptoherijanto, 1999).

Riset lain yang pernah dilakukan Bandiyono dan Indrawardani (2010), menjelaskan migrasi desa-kota, konteks urbanisasi sebagai fenomena kompleks kota-kota metropolitan, dan dampak yang ditimbulkan dari proses urbanisasi yang menjalar ke berbagai macam sektor terutama sosio-ekonomi, permasalahan demografi, dan para pekerja sektor informal yang bermukim di daerah kumuh. Migrasi yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat sebagai akibat dari variasi lingkungan tinggalnya, kondisi alam yang terus berubah dan terjadi perubahan kondisi sosial masyarakat, pasang surutnya perekonomian, menjadi salah satu pemicu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih berpotensi mendapatkan kesempatan yang lebih baik.

Kota utama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetap menjadi tujuan utama dan dianggap tempat yang lebih baik untuk mendapatkan kesempatan dibandingkan kota kedua dan kota penyangga (*suburban*) Jakarta, seperti kota Depok, kota Bogor, kota Tangerang, pun dengan kota Bekasi. Sebab, kota utama merupakan simpul hubungan politik, ekonomi, dan kultural. Terkonsentrasinya kekuasaan politik, pertumbuhan ekonomi dan budaya di perkotaan (Evers dan Korff, 2002:61).

Walaupun demikian, bukan tidak menyisakan permasalahan bahwa kota yang semakin berkembang yang diakibatkan urbanisasi menimbulkan permasalahan perkotaan, seperti permukiman kumuh (*slum area*), penghuni liar (*urban squatter*), dan kemiskinan kota (*urban poverty*) (Mauluddin, 2016; 2018).

Lebih lanjut Harahap (2013) menyebutkan akibat berlebihan yang ditimbulkan pada kondisi perkotaan, permasalahan kemiskinan, kriminalitas, pengangguran besar-besaran, bertambahnya permukiman kumuh, dan permasalahan di kota yang lainnya muncul. Kemudian, Harahap (2013) memandang bahwa urbanisasi sebagai faktor penentu terhadap sebuah kota berkembang secara ekonomi maupun sosial.

Permasalahan urbanisasi sebenarnya tidak hanya pada sektor ekonomi dan sosial, termasuk dalam pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan tidak diikuti oleh percepatan yang sebanding dalam hal industrialisasi. Harahap (2013) menjelaskan permasalahan yang muncul seperti halnya meningkatnya angka kemiskinan sehingga permukiman kumuh juga meningkat, peningkatan kriminalitas. Permasalahan tersebut tidak hanya muncul pada tatanan perkotaan melainkan perdesaan juga terkena dampak dari urbanisasi yang berlebih dengan berkurangnya sumber daya manusia yang lebih memilih untuk pergi ke kota. Secara sosial dampak yang ditimbulkan adalah pengangguran dan kemiskinan akibat membludaknya para pencari kerja di sektor formal maupun informal. Dampak lain yang ditimbulkan adalah kriminalitas, pola

tekanan yang terjadi pada masyarakat untuk bertahan hidup (*survive*) di lingkungan pemukiman kumuh menjadi penyebab tingkat kriminalitas yang semakin meningkat.

Berbeda halnya dengan Haryono (1999) riset yang dilakukannya di Desa Jetis, misalnya, yang merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Tawang Sari, kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menunjukkan dampak yang ditimbulkan proses urbanisasi yang terjadi dari salah satu desa di Sukoharjo, Jawa Tengah. Berbagai macam faktor yang mendorong masyarakat desa Jetis mulai sejak tahun 1970-an melakukan urbanisasi ke kota. Hilangnya kesempatan kerja sebagai akibat dari kemacetan industri tenun ditunjang dengan daya tarik kota berdasarkan informasi dari mereka yang telah melakukan urbanisasi.

Dampak yang ditimbulkan yang paling nampak dari proses urbanisasi terjadi pada aspek sosial dan ekonomi yaitu dengan meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat. Perubahan secara fisik nampak pada bangunan rumah baru dengan model gaya baru, terutama pada bangunan rumah mereka yang melakukan urbanisasi. Selain itu perubahan secara fisik terjadi pada sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, dan sarana peribadatan (Haryono, 1999).

Pada sektor pertanian dampak yang ditimbulkan cenderung kurang menguntungkan, hal tersebut terlihat dari sulitnya para pemilik sawah untuk mencari tenaga buruh tani. Lebih lanjut Haryono (1999) dari hasil risetnya dampak lain yang ditimbulkan adalah adanya budaya “pamer” status sosial. Dalam risetnya Haryono (1999) memberikan alternatif pemanfaatan situasi akibat adanya urbanisasi di Desa Jetis, yaitu perlu adanya kebijakan mengarahkan urbanisasi menjadi peluang untuk mempercepat proses pembangunan desa ke arah yang lebih dinamis, dengan memindahkan kemampuan dan pengalaman mereka dari daerah lain.

Pada akhirnya pola urbanisasi ini menjadi perhatian. Tidak hanya terbatas pada kota utama, namun kota kedua, bahkan kota penyangga. Perhatian tersebut perlu menyasar pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi urban (urbanisasi) dengan kualitas tinggi. Dengan demikian perlunya simpul-simpul pertumbuhan selain di kota utama.

Selain itu, harapan terjadi urbanisasi agar memperbaiki tingkat perekonomian orang yang menjadi urban. Namun malah sebaliknya yaitu menciptakan involusi kota (Evers dan Korff, 2002:77). Involusi kota perlu direspons untuk memperbaikinya dengan memanfaatkan potensi yang sebenarnya sudah dimiliki kota, yaitu kuantitas generasi millennial yang dimiliki sosi-spatial kota, yang sarat akan inovasi dan melek teknologi. Sebab, arus urbanisasi generasi millennial ke kota secara besar-besaran semakin lama semakin tidak terbendung lagi (Micom, 2016). Kini, kepadatan urbanisasi dengan adanya generasi millennial di perkotaan (linikini, 2018).

Generasi Millennial di Perkotaan

Generasi millennial adalah generasi yang lahir antara tahun 1982 dan 2004. Generasi ini dikenal juga dengan sebutan Gen-Y atau Generasi Y (ke depan istilah ini akan dipertukarkan di dalam tulisan). Generasi Y menjadi generasi di mana di dalamnya terdapat orang-orang dewasa muda (*youth adult*) yang paling merasa bahagia tinggal di perkotaan, khususnya kota-kota besar (Okulicz-Kozaryn dan Valente, 2018).

Terdapat perbedaan dengan riset sebelumnya yang menyebutkan bahwa umumnya di negara-negara maju merasa tidak bahagia dengan kehidupan di perkotaan. Penduduk yang tinggal di kota, terutama di daerah metropolitan terbesar dilaporkan paling tidak puas dengan kehidupannya. Namun, riset Okulicz-Kozaryn dan Valente (2018) yang dijelaskan di atas, yaitu dengan menggunakan *US General Social Survey* (1972-2016) menyatakan terdapat tren kebahagiaan terbaru. Hasilnya mengonfirmasi temuan sebelumnya tentang ketidakbahagiaan perkotaan. Sebagai kasus dari penelitiannya yaitu orang Amerika umumnya paling bahagia tinggal di kota-kota kecil dan daerah perdesaan. Namun, keuntungan hidup di perdesaan mengalami penurunan. Pekerjaan perdesaan semakin menghilang (Okulicz-Kozaryn, 2015). Orang perdesaan Amerika menjadi kurang bahagia dibandingkan dengan kaum urban. Dan, generasi millennial-lah orang yang paling bahagia tinggal di kota-kota besar (estimasi besarnya lebih dari penghasilan tambahan US\$100.000 pendapatan keluarga per tahunnya).

Riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan kehidupan di perkotaan umumnya di negara-negara maju di antaranya dilakukan oleh Ala-Mantila, Heinonen, Junnila,

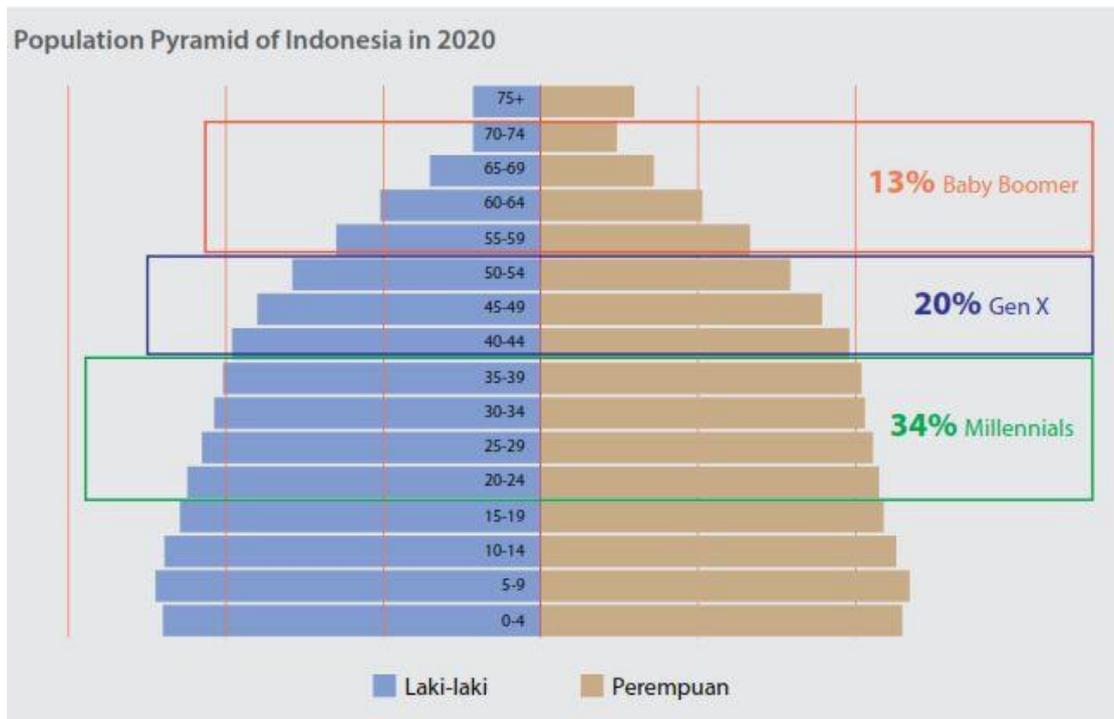
dan Saarsalmi, 2017; Morrison dan Weckroth, 2017; Okulicz-Kozaryn, 2015; Sorensen, 2014 seperti dijelaskan di dalam artikel Okulicz-Kozaryn dan Valente (2018). Penduduk dari beberapa kota metropolitan terbesar di dunia memberi laporan terkait tingkat kebahagiaan terendah. Seperti, St. Louis, New York City, Detroit, dan Philadelphia merupakan tempat di Amerika Serikat yang paling rendah tingkat kebahagiaannya (Okulicz-Kozaryn & Mazelis, 2016; Senior, 2006, dalam Okulicz-Kozaryn dan Valente, 2018). New York City menjadi kota terbesar, dan Philadelphia menjadi salah satu yang terbesar. Demikian juga dengan kota London, merupakan tempat terbesar dan memiliki tingkat kebahagiaan yang rendah di Inggris (Chatterji, 2013; Kantor Statistik Nasional (ONS), 2011, dalam Okulicz-Kozaryn dan Valente, 2018). Begitu pula dengan Toronto, wilayah metropolitan terbesar di Kanada, adalah tempat yang paling tidak bahagia kedua (hanya Vancouver, wilayah metropolitan ketiga yang kurang bahagia) (Lu, Schellenberg, Hou, dan Helliwell, 2015, dalam Okulicz-Kozaryn dan Valente, 2018). Helsinki adalah tempat terbesar dan paling tidak bahagia di Finlandia (Morrison 2015, dalam Okulicz-Kozaryn dan Valente, 2018). Di Selandia Baru, Auckland menjadi tempat yang paling tidak bahagia. Kota terbesar di Australia, Sydney pun menjadi paling tidak bahagia. Kemudian Dublin di Irlandia (Morrison 2011, dalam Okulicz-Kozaryn dan Valente, 2018).

Penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan perkotaan bukan implikasi dari masalah-masalah perkotaan *an sich*, seperti kriminalitas perkotaan dan kemiskinan. Namun, kota-kota itu sendiri. Artinya terkait dengan karakteristik kota, seperti ukuran dan kepadatan, berkorelasi terhadap ketidakbahagiaan penduduknya (Okulicz-Kozaryn dan Mazelis 2016, dalam Okulicz-Kozaryn dan Valente, 2018).

Studi Okulicz-Kozaryn dan Valente (2018) berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan para peneliti lain –seperti sudah dijelaskan sebelumnya– risetnya menunjukkan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan subyektif telah bervariasi dari generasi ke generasi dan dari waktu ke waktu. Selain itu, yang sebelumnya fokus ke spasial menjadi fokus ke urbanitas dengan fokus pada waktu. Gradien kebahagiaan desa-kota Amerika selama empat dekade terakhir, menjadi penelusuran utama. Penelitiannya menggunakan pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu termasuk tahun-tahun terakhir (1972-2016). Kebahagiaan atau kesejahteraan subyektif-*subjective well-being* (SWB) diukur dengan berbagai survei. Misalnya, Ballas (dalam Okulicz-Kozaryn dan Valente, 2018) tentang hubungan antara urbanisasi dan SWB. Kesejahteraan subyektif yang menjadi salah satu penyebab terjadinya urbanisasi, terutama bagi Gen-Y.

Gen-Y *meng*-urban, disebabkan proses urbanisasi. Kebahagiaan tinggal di perkotaan bagi Gen-Y menjadi alasan yang argumentatif. Proses ini menyebabkan persentase penduduk di perkotaan didominasi oleh generasi muda (generasi millennial). Di Indonesia, misalnya, di tahun 2020 generasi millennial berada pada rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun, *notabene* berada pada usia produktif, generasi ini diprediksi berjumlah 83 juta jiwa atau 34% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 271 juta jiwa. Proporsi generasi ini lebih besar dibandingkan generasi lainnya (seperti *Baby Boomer* dan generasi setelahnya –di luar Gen-Y) (Alvara Research Center, 2016). Seperti dapat terlihat pada Gambar 1 di bawah:

Gambar 1
Piramida dominasi populasi Gen-Y



Sumber: Central Bureau of Statistics, dalam Alvira Research Center, 2016

Tidak hanya di Indonesia, di Toronto, Kanada misalnya populasi millennial meningkat. Ada 2,5 juta orang tinggal di kota, jumlahnya pun terus meningkat dan 45% nya adalah generasi millennial (City of Toronto Community Council Profiles, dalam Ramsay et al., 2017). Selain itu, di pusat kota Amerika terdapatnya peningkatan populasi generasi millennial. Pertumbuhan populasi di pusat kota dapat terlihat sangat tinggi dari tahun 1990 hingga 2010 (Lee, 2018).

Kini pada tahun 2018, di Indonesia tren populasi Gen-Y sudah terlihat. Dari data di atas, misalnya, bisa terlihat orang dewasa muda (*youth adult*) yang lahir tahun 1982-2004 sekarang sudah berusia 24-36 tahun. Rentang usia tersebut dapat ditarik kesimpulan masih di kisaran 34% generasi millennial yang mendominasi kelompok demografis.

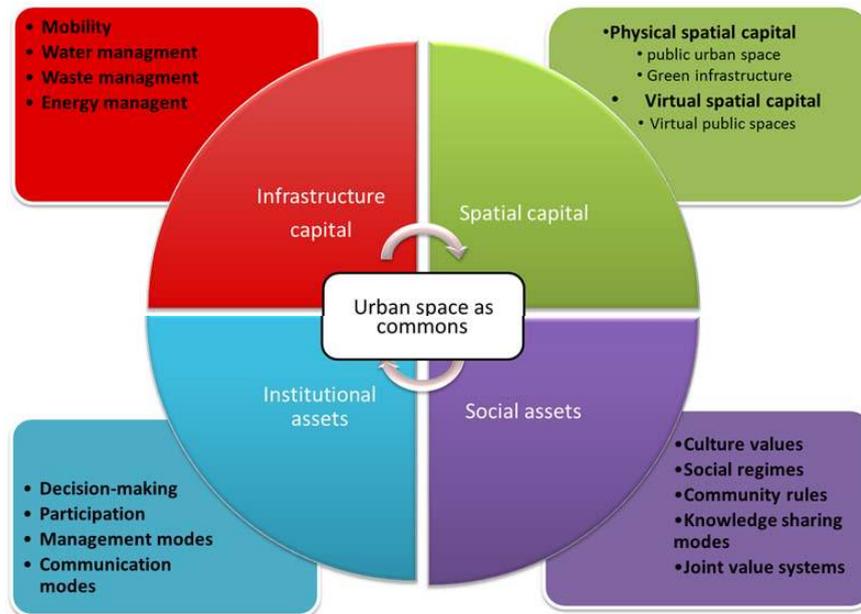
Generasi ini perlu disiapkan menjadi warga kota yang bertanggung jawab terhadap lingkungan berkelanjutan. Sebab, migrasi kontemporer generasi millennial ke kota bertujuan untuk mendapatkan lingkungan yang “hidup” (Schoolman et al., 2016). Lingkungan yang hidup tersedia karena tata ruang kota yang mengakomodir para generasi millennial.

Tata Ruang Kota untuk ‘Gen-Y’

Ruang kota adalah ruang milik bersama (*tragedy of commons*) (Hardin, dalam Ondrejicka 2017). Ondrejicka (2017) menyajikan sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan ruang perkotaan, yang mencerminkan tantangan era dewasa ini dalam pengembangan ruang berdasarkan teori *Commons*. Teori *Commons* dalam konteks ruang perkotaan dapat diartikan juga secara jelas sebagai ruang milik bersama atau peruntukannya bagi komunitas pengguna dan aktor yang relevan.

Gambarannya dapat dilihat di bawah ini, dengan memperlihatkan *urban space as commons*, yang terdiri dari aset sosial, aset institusi, modal infrastruktur, dan modal spasial. Perlu diperhatikan juga variabel lain yang termasuk di dalamnya, pada Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2
Urban spaces as Commons



Sumber: Ondrejicka 2017

Sebagai kasus taman kota di Massachusetts disebut *Boston Common*. Tempat-tempat kepentingan bersama ini sangat penting untuk sosio-spasial kota, sehingga perlu dipelihara, dilindungi, dan ditingkatkan (Benfield, 2013). Ruang kota yang baik mampu merespons kebutuhan dari perubahan yang berlangsung secara alamiah di masyarakat. Perubahan yang dimaksud adalah kuantitas generasi millennial yang berlangsung secara alamiah di perkotaan.

Riset Moos (2016) pun menganggap pentingnya usia (*youthification*) di dalam menggambarkan ruang kota. Usia yang dimaksud adalah kategori orang dewasa muda (*young adult*), disebut dengan generasi millennial. Gen-Y pada akhirnya menjadi lebih penting dari waktu ke waktu dalam menggambarkan kehidupan kota berdensitas tinggi.

Jika merujuk Gambar 2 di atas, yang dikembangkan Ondrejicka (2017), kemudian diperluas oleh penulis, terdapat elemen kapital spasial dari *urban space as commons* berupa *virtual public space*. Ruang publik virtual tidak sepenuhnya dimaknai sebagai ruang publik 'maya', namun lebih kepada ruang publik yang sarat akan teknologi dan inovasi di dalamnya.

Pada perkembangan inovasi perkotaan, muncul yang disebut dengan *tech park* (Hartley 2018). Di sana peran generasi millennial yang sarat akan inovasi dan ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Kebijakan perkotaan pasca-Pembangunanisme yang lebih kepada pembangunan infrastruktur fisik, yaitu pembangunan yang lebih kepada sistem jaringan dan inovasi di perkotaan.

Kasus di kota Shanghai, misalnya, dengan Shanghai Urban Master Plan (2017–2035) nya memiliki visi untuk menjadi kota Global yang sangat baik, inovatif namun tetap menjadi kota yang manusiawi dan bervisi ekologi. Walaupun demikian yang menjadi tantangan dari struktur ganda daerah perkotaan dan perdesaan, dan fenomena pembangunan antara pinggiran kota dan pusat kota Shanghai tidak seimbang yang terus berlanjut. Pan et al. (dalam Shi, 2018) menyebutkan bahwa Shanghai pusat menempati alokasi sumber daya yang berlebihan, sedangkan pengembangan pinggiran kota tertinggal. Urbanisasi yang berlebihan di pusat kota terjadi karena pembangunan pinggiran kota yang tidak memadai. Perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan untuk pembaruan perkotaan (*urban renewal*) yaitu harus meningkatkan kuantitas ruang publik, dan tingkat ruang hijau yang cakupan hijau harus mengoptimalkan struktur penggunaan lahan. Selain itu meningkatkan aspek ekologi dan sosio-kultural. Kemudian, proyek yang melibatkan aktor privat dalam membangun ruang harus

memperhatikan prinsip pelestarian sumber daya dan skala prioritas pada infrastruktur kota dan fasilitas layanan publiknya (Shi, 2018).

Walaupun demikian, Aminah (2015) dalam risetnya mewanti-wanti adanya keterkaitan antara ruang dan politik. Argumentasi tersebut berdasar pada riset yang dilakukannya, dengan temuan praktik tata ruang sebagai indikasi dari transformasi dalam proses penataan ruang, yang di dalamnya muncul ruang dominan akibat peran serta proses politik. Ruang dominan tersebut sebagian besar dimiliki oleh kelas pengembang/investor kapitalis. Sedangkan sebagian lainnya berada pada masyarakat (Aminah, 2015). Lebih lanjut Aminah (2015) menjelaskan dinamika ekonomi-politik dalam praktik penataan ruang, di dalam praktik penataan ruang pemerintah, investor, dan masyarakat ikut memberikan sumbangsih dalam hal inkonsistensi terhadap implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kasus di dalam risetnya Aminah (2015) dalam penataan ruang di kota Surabaya, pemkot berperan sebagai refleksi sistem kapitalis yang bertugas untuk mengatur dan merasionalisasi ruang untuk produksi dan ruang sosial ekonomi.

Argumentasi tersebut bertujuan agar penataan ruang tidak hanya ditujukan untuk golongan kapitalis, akan tetapi juga di-restrukturisasi dengan cara mengubah fungsi ruang dan diperuntukkan kepentingan publik. Sebab, ruang kota yang terekspresikan ke publik merupakan dialektika antara produksi, konsumsi, dan administrasi atau planologi dan implementasi dari kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan kajian penataan ruang terbaru yang menunjukkan penataan ruang kota berdasarkan refleksi kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Aminah, 2015). Refleksi yang dimaksud berdasarkan pada pembuat kebijakan (politik) yang mampu merespons peluang besarnya generasi millennial (kondisi sosial), di perkotaan, karena faktor pertumbuhan (ekonomi) di pusat-pusat kota (dari mulai kota utama, kedua, sampai kota penyangga).

Selain itu yang paling penting dari semuanya adalah keberlangsungan dari kota itu sendiri, terutama untuk para generasi millennial. Riset O'Dell (2016) menunjukkan peran penting taman dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Belajar dari pelayanan taman nasional di Amerika, taman berfungsi untuk memupuk hubungan sosial yang penting bagi kohesi komunitas dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Bagi generasi millennial taman memberikan kesehatan mental dan sosial.

Tahun 2015 yang lalu para peneliti Deakin University, Australia, Townsend, Henderson-Wilson, Warner, & Weiss (dalam O'Dell, 2016) membuat laporan yang berjudul "*Healthy Parks Healthy People*" menghasilkan temuan bukti substansial bahwa akses ke taman dan ruang hijau meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di sepanjang hidupnya. Laporan tersebut berimplikasi pada argumentasi kuat untuk berinvestasi di sektor ini dan mempromosikan taman sebagai sumber daya kesehatan.

Sebagai layanan taman Nasional sudah banyak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan pembuatan taman nasional yang relevan dengan generasi baru (millennial) orang Amerika (O'Dell, 2016). Sebuah artikel terbaru yang ditulis Okulicz-Kozaryn dan Valente (2018) dengan judul "Tidak ada penyakit perkotaan untuk generasi milenial". Kehadiran Gen-Y di perkotaan ini tidak terlepas dari proses menjadi urban atau urbanisasi. Ketika sudah *urban*, maka pentingnya kualitas dari kehidupan masyarakat urban, di antaranya dengan memperhatikan kualitas tata ruang kota.

Merujuk pada Gambar 2 *Urban Space as Commons*, terdapat elemen kapital spasial dalam bentuk *Green Infrastructure (GI)*. GI menjadi sarana tata ruang kota untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat urban, dan penting dalam membangun ketahanan sosial dan ekologi (Shackleton, 2018). GI yang baik yaitu berupa kuantitas dan distribusi dari ruang hijau. Artinya berapa banyak ruang hijau dan di mana lokasinya. GI bermanfaat bagi individu terhadap kesejahteraan materi maupun psikologisnya. Dalam kasus penelitian Shackleton (2018) yaitu pentingnya ruang hijau sebagai dasar dari *green infrastructure* di kota-kota kecil dan menengah di Afrika Selatan, di dalam kasus penelitiannya.

Di Indonesia misalnya, diatur terkait Tata Ruang Kota, dalam regulasi UU No 26 Tahun 2007, mengamanatkan sebagaimana di pasal 29 ayat 2 dan 3, bahwa proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah kota harus tersedia paling sedikit 30 persen dan proporsi ruang terbuka hijau publik (RTH Publik) paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Dalam UU ini

penataan ruang sangat jelas diatur bahwa perlunya penyediaan dan pemanfaatan RTH yang diisi oleh tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun ditanam secara sengaja.

RTH yang dimaksud di dalam UU Tata Ruang No 26 Tahun 2007, yaitu RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik yang dimaksud yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Misalnya, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan, Ruang terbuka hijau privat yaitu ruang terbuka hijau yang ditanam oleh perseorangan, swasta, dan pemerintah. Pemerintah, swasta, atau perseorangan didorong untuk menanam tanaman di atas gedung/rumah miliknya. Ruang terbuka hijau privat yang dimaksud antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Tujuan penataan ruang demikian bertujuan menjamin keseimbangan ekosistem kota. Total RTH 30% proporsi yang disebut dalam UU Tata Ruang ini terdiri dari ruang terbuka hijau publik (RTH Publik) paling sedikit 20%, dan ruang terbuka hijau privat (RTH Privat) paling sedikit 10%.

Lebih lanjut, Shackleton (2018) menyebutkan bahwa penduduk kota dapat mengambil peran dengan cara melobi atau memilih pejabat terpilih yang mengadvokasi GI, atau dapat juga bergabung dengan NGO/ LSM untuk melindungi dan mempertahankan GI. Selain itu bisa juga dengan penanaman pohon secara mandiri. Selain itu dari perubahan demografi dengan membludaknya generasi millennial, Deka (2018) menyebutkan keuntungan dari adanya Gen-Y ini, menunjang kualitas kehidupan di perkotaan yaitu kebiasaannya yang lebih suka menggunakan moda transportasi umum (seperti komuter) daripada moda transportasi pribadi. Saling menopang satu sama lain. Para pembuat kebijakan memfasilitasi dengan GI demi terciptanya ekosistem kota yang sehat, ditopang kebiasaan para generasi millennial yang lebih menyukai transportasi umum, dengan harapan mengurangi emisi karbon. Akhirnya sama-sama menopang ekosistem kota yang sehat.

Walaupun demikian, Ramsay et. al (2017) di dalam penelitiannya menemukan ada hambatan bagi generasi millennial di perkotaan untuk berkunjung ke taman nasional. Hambatan utama yang dimaksud di antaranya jarak, transportasi, dan kesadaran akan taman itu sendiri. Alasan transportasi, karena masih minimnya transportasi umum dan berkelindan dengan kemacetan. Pun terkait kesadaran disebabkan karena buruknya sosialisasi pengetahuan dengan medium teknologi.

Temuan Ramsay et. al (2017) menarik lainnya, urbanisasi yang intensif berakibat pada kota yang lebih padat penduduk, dan lebih sedikit ruang hijau. Dengan kasus Rouge Urban National Park di Toronto, yang menjadi taman nasional urban pertama di Kanada. Dipandang menjadi taman yang ideal untuk populasi generasi millennial. Sebab, menawarkan rekreasi luar ruang dan ruang hijau. Kasus penataan urbanisasi sebenarnya sudah sejak lama diterapkan seperti di Amerika tahun 1970-an, yaitu dengan membangun Urban National Parks (UNPs) dan dianggap yang paling awal, dengan tujuan utama rekreasi warga dan konservasi alam. Dengan alasan urbanisasi yang menjadikan sebagian besar penduduk di dunia tinggal di kota-kota, dapat mengurangi ruang hijau yang tersedia dan begitu dengan akses ke taman. Dibangunnya UNPs ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Hal yang menjadi penting adalah keterlibatan teknologi dalam ketersediaan taman, perlu untuk para generasi millennial. Generasi millennial biasa disebut juga “generasi digital”. Sebab kelompok usia ini sangat khusus dibentuk oleh pengaruh teknologi (Coletto, dalam Ramsay et. al., 2017).

Penelitian Hoolachhan dan McKee (2018) menyebutkan banyak yang menyalahkan kebijakan pemerintah yang tidak mewakili kepentingan generasi Millennial. Sangat penting bagi para urban planing dan pembuat kebijakan, untuk memahami generasi millennial (Lee, 2018). Manheim dan Bourdieu (dalam Hoolachhan dan McKee 2018) menawarkan mekanisme yang berguna dalam kehidupan generasi millennial. Generasi ini disebutnya menghindari untuk terlalu deterministik atau individualistis. Lee (2018) dengan risetnya di Amerika memberikan rekomendasi bahwa tren populasi generasi millennial di perkotaan harus dipahami dan difokuskan pada diskusi untuk memanfaatkan potensi dari perubahan demografi ini, oleh para pembuat kebijakan dan urban planing. Dengan tujuan untuk membangun komunitas yang lebih sehat, berkelanjutan dan memiliki daya tahan (*resilient*).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kebijakan tata ruang kota dari proses menjadi urban (urbanisasi) generasi millennial adalah tersedianya ruang terbuka hijau di perkotaan yang inovatif dengan medium teknologi. Di satu sisi Gen-Y mampu memberikan sentuhan inovasi berbasis teknologi, di sisi yang lain pembuat kebijakan merespons tren perubahan demografi yang didominasi Gen-Y dengan kebijakan yang mengakomodir para generasi millennial di perkotaan dengan dibuatnya *tech park*.

Taman Teknologi (*tech park*) yang harus tersedia di setiap kota di Indonesia. Para generasi millennial direspons secara benar dan tepat nilai dengan ketersediaan ruang terbuka hijau demi terciptanya ekosistem kota dan ruang interaksi sosialnya, khususnya dengan karakteristik Gen-Y, agar berkelanjutan. Dengan demikian, besarnya kuantitas kelompok demografis generasi millennial dapat menjadi peluang bagi kemajuan Indonesia ke depan.

Rekomendasi dari riset ini yaitu, pertama, penataan urbanisasi harus dipahami secara tepat nilai dan potensi penduduk yang didominasi kelompok demografis Gen-Y, serta pekerjaan di pusat sosio-spasial kota. Kedua, kebijakan tata ruang kota harus menyesuaikan perubahan demografi alamiah di masyarakat yang trennya didominasi generasi millennial. Ketiga, tata ruang kota (ruang terbuka hijau publik taman kota ber-teknologi atau *tech park*) tersedia dengan kuantitas dan distribusi ruangnya di setiap kota di Indonesia tidak hanya ada di kota utama (*urban primacy*) dan kota kedua (*secondary city*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini sepenuhnya didanai oleh Direktorat Analisis Dampak Kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun anggaran 2018. Penelitian kolaboratif ini terselenggara berkat kerjasama antara BKKBN Pusat dan CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. serta melibatkan banyak peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Tulisan ini menjadi salah satu luaran (*output*) dari riset kolaboratif tersebut. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih, atas kerjasama yang diberikan dan semoga memberikan masukan secara praktis pada institusi dan teoretis pada ilmu pengetahuan di bidang kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., dan Purwandi, L. (2016). *Indonesia 2020: The Urban Middle-Class Millennials*. Alvara Research Center.
- BPS. (2010). *Data Kependudukan*.
- Aminah, S. (2015). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, Vol 20 No. 1, Januari 2015, hlm. 59-79.
- Bandiyono, S., dan Indrawardani, K. F. (2010). Tinjauan Migrasi Penduduk Desa-Kota, Urbanisasi dan Dampaknya. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2010, hlm. 41-54.
- Benfield, K. (2013). The Important Difference Between a Public Space and a 'Common'. <https://www.citylab.com/equity/2013/07/sustainability-and-urban-commons/6200/>.
- Deka, D. 2018. Are millennials moving to more urbanized and transit-oriented counties? *The Journal of Transport and Land Use*. Vol. 11 No. 1 [2018] pp. 443-461.
- Evers, H. D., dan Korff, R. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara. Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial* (terj.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi bagi Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Society*, Vol. 1 No. 1, Juni 2013, hlm. 35-45.
- Hartley, K., et al. (2018). Urban innovation policy in the postdevelopmental era: Lessons from Singapore and Seoul. *Asia Pac Policy Stud.* 2018;5:599–614.
- Haryono, T. J. S. (1999). Dampak Urbanisasi terhadap Masyarakat di Daerah Asal. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol. XII No. 4, Oktober 1999, hlm. 67-78.
- Hoolachan dan McKee. (2018). Inter-generational housing inequalities: 'Baby Boomers' versus the 'Millennials'. *Urban Studies* 1–16.
- Katherina, L. K. (2014). Tren Urbanisasi pada Second Cities di Indonesia Periode Tahun 1990-2010. *Jurnal Kependudukan* Vol. 9 No. 2, Desember 2014 hlm. 73-82.
- Koran Kompas. (2018), diakses per Desember 2018.
- Lee, H. (2018). Are Millennials Coming to Town? Residential Location Choice of Young Adults. *Urban Affairs Review* 1 –40.
- Linikini.id. (2018), diakses per Desember 2018.
- Mauluddin, Agus. (2016). Plus Minus Urban Primacy. *Koran Suara Karya*.
- (2017). Smart City dalam Perspektif Sosiologi. *Smart City & Urban Crisis* 1 (2017), 308.
- (2018). Collaboration of Triple Helix Actors in The Production of Public Space: The Tematic Park In Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Volume 7, Issue 2, July-December, 2018: 51-61.
- Micom. (2016). Generasi Milenial dan Nasionalisme Pembangunan Pertanian. *Media Indonesia*.
- Moos, M. (2016). From gentrification to youthification? The increasing importance of young age in delineating high-density living. *Urban Studies* 2016, Vol. 53(14) 2903–2920.
- O'Dell, P. (2016). Redefining the National Park Service Role in Urban Areas. *Journal of Leisure Research* 2016, Vol. 48, No. 1, pp. 5–11.
- Okulicz, K. A., dan Valente., R. R. (2018). No urban malaise for Millennials. *Regional Studies*, DOI: 10.1080/00343404.2018.1453130.
- Okulicz, K. A. (2015). *Happiness and place. Why life is better outside of the city*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ondrejicka, V., et. al. (2017). Urban Space as the Commons - New Modes for Urban Space Management: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 95 (2017).
- Ramsay et. al. (2017). The Barriers to Millennials Visiting Rouge Urban National Park. *Sustainability* 2017, 9, 904.
- Schoolman, et. al. (2016). Green cities and ivory towers: how do higher education sustainability initiatives shape millennials' consumption practices? *J Environ Stud Sci* (2016) 6:490–502.
- Somantri, G. R. (2002). *Jakarta di Tahun 2002*. staff.ui.ac.id/publikasi/artikel.
- Shackleton et. al. (2018). How important is green infrastructure in small and medium-sized towns? Lessons from South Africa. *Landscape and Urban Planning* (2018) 180 273–281.

- Shi, Y., dan Liu, D. (2018). Excessive Urbanization and Rejuvenation in the Metropolitan City Center in Shanghai, China. *J. Urban Plann. Dev.*, 2018, 144(4): 05018020.
- Tjiptoherijatno, P. (1999). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. *Populasi*, Vol. 10 No. 2, hlm. 57-72.
- UU No 26 tahun 2007, tentang Tata Ruang.
- Venerandi, A., et. al. (2018). A scalable method to quantify the relationship between urban form and socio-economic indexes. *EPJ Data Science* (2018) 7:4.